

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPK-SKPD dalam kegiatan meneliti SPP, SPP tidak diteliti sebelum SPM diterbitkan seperti yang terjadi di dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan sekretariat DPRD; belum tertib administrasi karena tidak ada PPK SKPD yang membuat register SPP UP/GU/TU/LS.
2. Dalam kegiatan menyiapkan SPM, SPM diterbitkan oleh bendahara pengeluaran seperti yang terjadi di dinas kesehatan dan sekretariat DPRD; SPM diterbitkan sekaligus dengan pengajuan SPP; SPM diterbitkan tanpa melalui kegiatan meneliti SPP; PPK SKPD belum tertib administrasi terkait tugasnya membuat surat penolakan penerbitan SPM untuk SPP yang salah atau tidak lengkap dan dalam membuat register surat penolakan penerbitan SPM.
3. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPK-SKPD dalam kegiatan melakukan verifikasi SPJ, masih ada verifikator yang tidak memperhatikan beberapa aspek keabsahan SPJ dalam kegiatan verifikasi; belum tertib administrasinya PPK SKPD dalam membuat register penerimaan SPJ, register pengesahan SPJ, dan register penolakan SPJ; dan alur pengajuan SPJ dari PPTK sebelum diverifikasi PPK-SKPD pada saat-saat tertentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK-SKPD dalam kegiatan menyiapkan laporan keuangan SKPD dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran seperti yang terjadi di dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sekretariat DPRD.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran, diantaranya:

1. Agar fungsi dan tugas bendahara pengeluaran dikembalikan sesuai dengan tupoksi yang ada dalam aturan yang terkait agar peran PPK SKPD dalam kegiatan penatausahaan keuangan menjadi efektif
2. PPK-SKPD diharapkan tertib administrasi, yaitu dalam menyiapkan register SPP UP/GU/TU/LS, register SPM, register surat penolakan SPP, register penerimaan SPJ, register penolakan SPJ, register pengesahan SPJ.
3. Pemerintah Daerah Kota Solok sebaiknya membuat SOP untuk kegiatan penatausahaan pengeluaran sehingga membuat tahapan tugas masing-masing pengelola keuangan daerah menjadi jelas.
4. Pemerintah Kota Solok diharapkan dapat memfasilitasi PPK-SKPD dengan mengadakan pelatihan secara rutin terkait tugas dan fungsi PPK-SKPD dan mengenai aturan baru terkait kegiatan penatausahaan pengeluaran.

